

EVALUASI KINERJA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN  
DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS TANAMAN PANGAN DI  
KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2015

Oleh:

**Akbar Salahudin**

**20130520146**

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**ABSTRAK**

Penelitian ini Dilakukan di Kabupaten Barito Utara. Hal ini dikarenakan kontribusi sektor pertanian pada Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun 2008 hingga tahun 2012 yang terus mengalami penurunan di Kabupaten Barito Utara. Pada tahun 2013 kontribusi sektor pertanian juga semakin mengalami penurunan kontribusi pada tahun sebelumnya. Menurunnya kontribusi sektor pertanian ini menyebabkan sektor pertambangan menjadi penyumbang terbesar dalam PDRB. Dominasi sektor pertanian dalam memberikan kontribusi pada PDRB pada tahun 2013 sudah tergantikan dengan meningkatnya sektor pertambangan dan menurunnya kontribusi sektor pertanian.

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Barito Utara. Teknik yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana data dan bahan yang akan digunakan adalah data yang diperoleh dari lapangan dan kemudian di dukung dengan data-data lain seperti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.

Penurunan kontribusi sektor pertanian pada PDRB ini dikarenakan berkurangnya minat masyarakat di Kabupaten Barito Utara dalam mengelola pertanian. Dimana para pemuda lebih memilih untuk bekerja di pabrik industri daripada harus membuka lahan pertaniannya sendiri. Peran pemerintah dalam memberikan pelayanan dan pembangunan seharusnya memfokuskan kepada sektor pertanian dikarenakan sektor pertanian terus memberikan kontribusi yang besar pada PDRB hingga tahun 2012. Kondisi ini semakin memburuk pada tahun 2013 sektor pertanian justru semakin mengalami penurunan. Pemerintah seperti tidak memberikan keadilan kepada sektor pertanian. Keberlanjutan sektor pertanian di Kabupaten Barito Utara memberikan ancaman kepada Pemerintah Daerah. Dimana Pemerintah Pusat menginginkan terjadinya ketahanan pangan di Daerah-daerah, sehingga membuat Pemerintah Daerah harus bekerja lebih maksimal lagi untuk meningkatkan produktivitas dari sektor pertanian ini khususnya dalam hal tanaman pangan.

**Kata Kunci:** Pemerintah Daerah, Pertanian, Tanaman Pangan

## I. PENDAHULUAN

Sejarah perekonomian mencatat desentralisasi telah muncul ke permukaan sebagai paradigma baru dalam kebijakan dan administrasi pembangunan sejak dasawarsa 1970-an. Tumbuhnya perhatian terhadap desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan terpusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan, tetapi juga adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak dapat dikendalikan dan direncanakan dari pusat. Karena itu dengan penuh keyakinan para pelopor desentralisasi mengajukan sederet panjang alasan dan argumen tentang pentingnya desentralisasi dalam perencanaan dan administrasi di Negara dunia ketiga.

Indonesia adalah salah satu Negara yang menerapkan sistem desentralisasi dalam sistem pemerintahannya. Dalam menerapkan sistem pemerintahan desentralisasi ini tentu saja Pemerintah mempunyai maksud dan tujuan yang jelas untuk merencanakan masa depan yang baik bagi Negaranya. Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi tahun 1999 itu adalah membebaskan pemerintah pusat dari beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga berkesempatan untuk mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaatnya. Pada saat yang sama, Pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategi. Dengan desentralisasi kewenangan pemerintah pusat ke daerah, maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Kemampuan prakarsa dan kreativitas mereka akan terpacu, sehingga kapabilitas dalam mengatasi berbagai masalah domestik akan semakin kuat. Desentralisasi merupakan simbol "trust" dari pemerintah pusat kepada sistem yang sentralistik, mereka tidak bisa berbuat banyak dalam mengatasi berbagai masalah. Dalam sistem otonomi mereka di tantang untuk secara kreatif menemukan solusi atas berbagai masalah yang dihadapi.

Salah satu kewenangan yang dilimpahkan oleh pusat kepada daerah (Dekonsentrasi) adalah kewenangan di bidang pertanian. Besarnya kewenangan dalam pelaksana kebijakan daerah memberikan dampak positif dan negatif terhadap pengembangan pertanian. Pembangunan pertanian yang dianggap oleh sebagian birokrasi dan legislator lokal sebagai bidang *cost-center* yang membutuhkan investasi besar namun returnnya cukul lama. Hal ini yang menyebabkan mengapa isu pembangunan pertanian kurang menarik perhatian bagi sebagian besar pembuat kebijakan daerah. Di sektor pertanian, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada tahun 1984 dan produksi komoditas seperti kelapa sawit, karet, kopi meningkat dengan pesat.

Di era otonomi saat ini, daerah dituntut harus mandiri dalam memanfaatkan potensi daerah, untuk itu sektor pertanian dapat memberikan kontribusi yang sangat bermakna terhadap kemampuan daerah dalam memperbesar kemampuan pembiayaan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Barito Utara adalah salah satu daerah yang perekonomian masyarakatnya masih tergantung kepada hasil

pertanian. Hal ini dilihat dari Pendapatan Domestik Regional Bruto, yang memperlihatkan sektor pertanian masih berada pada posisi teratas. Pendapatan Domestik Regional Bruto dapat diartikan sebagai keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan ekonomi selama kurun waktu tertentu di suatu wilayah domestik tanpa mempertimbangkan kepemilikan faktor produksi. PDRB bisa juga disebut sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah dan kurun waktu tertentu.

Potensi Daerah Kabupaten Barito Utara sampai tahun 2012 masih tetap bertumpu pada sektor pertanian dan sektor pertambangan & penggalian. Hal ini ditunjukkan dengan andil peranan sektor pertanian yang paling dominan dalam pembentukan struktur perekonomian Kabupaten Barito Utara yakni sebesar 23,32 persen terhadap PDRB, meskipun dominan tetapi andil sektor pertanian terhadap PDRB memiliki tren yang cenderung menurun. Berbeda dengan sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian justru memiliki tren yang cenderung naik dari tahun ke tahun. Tahun 2013 struktur perekonomian Kabupaten Barito Utara mengalami pergeseran yang cukup berarti. Selama lebih dari satu dekade perekonomian di Kabupaten Barito Utara bertumpu pada sektor pertanian. Pada Tahun 2013 struktur perekonomian di Kabupaten Barito Utara didominasi oleh sektor pertambangan & penggalian. Hal ini ditunjukkan dengan peranan sektor pertambangan dan penggalian yang paling dominan dalam pembentukan struktur perekonomian Tahun 2013 di Kabupaten Barito Utara yakni sebesar 23,58 persen terhadap PDRB disusul peranan sektor pertanian sebesar 22,13 persen terhadap PDRB.

Dilihat dari hasil ini pemerintah daerah harus aktif dalam mengembangkan sektor pertanian di kabupaten barito utara, terutama meningkatkan produksi tanaman pangan pada tahun-tahun berikutnya di kabupaten Barito Utara. Pada dasarnya proses pembangunan pertanian tidak hanya ditunjukkan untuk menghasilkan produk semata, akan tetapi bersamaan kegiatan pertanian adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, sekaligus dalam upaya pengentasan kemiskinan masyarakat di pederdesaan. Mengingat bahwa komoditi padi memegang peranan yang sangat strategis sebagai sumber bahan pangan pokok masyarakat indonesia pada umumnya, maka arah utama kebijakan pembangunan pertanian adalah meraih swasembada beras secara berkelanjutan. Namun demikian persoalan pokok adalah masih rendahnya produksi padi yang dicapai karena rendahnya produktivitas yaitu rata-rata 25,52 ku/ha atau lebih rendah dari produktivitas padi tingkat provinsi Kalimantan Tengah yaitu 30,01 ha/ku. Oleh sebab itu untuk mencapai hasil yang optimal, peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai harus segera diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana atau prasarana pertanian, mengoptimisasikan lahan potensial dan pemberdayaan masyarakat tani.

## II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti ialah : (1) Bagaimana kinerja Dinas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan Dalam Meningkatkan Produktivitas Tanaman Pangan Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 ? (2) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Dinas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan dalam meningkatkan produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 ?

## III. KERANGKA TEORI

### a. Pemerintah Daerah

Secara umum Sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah dapat dipahami sebagai stakeholder yang menjalankan pemerintahan menurut asas dan peraturan yang berlaku. Pada prinsipnya pemerintah merujuk kepada legislator, administrator dan arbiter dalam birokrasi administrasi pada sistem pemerintahan yang dijalankan secara terorganisir. Selebihnya pemerintah merupakan sarana Negara dalam menentukan kebijakan.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah kewenangan pemerintah di daerah di bagi menjadi tiga yaitu eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Eksekutif adalah kepala Daerah beserta dinas-dinasnya yang bertindak sebagai pelaksana kebijakan, Legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertugas sebagai perancang kebijakan, dan Yudikatif adalah Lembaga penegak hukum berupa pengadilan dan kejaksaan serta kepolisian sebagai penyambung tugas administrative dari pusat ke daerah.

### b. Evaluasi Kinerja

Nurcholis H (2005:169) mendefinisikan evaluasi adalah proses mendasarkan diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu. Oleh karena itu, harus ada pembuatan skema umum penilaian dan seperangkat instrumen yang meliputi parameter indikator. AAP Mangkunegara (2005:12) mendefinisikan kinerja adalah merujuk kepada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Jefkin F (1992:57) mendefinisikan kinerja adalah merujuk kepada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik

### **Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja**

Kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal (Hessel: 2005: 175):

- 1) Faktor Politik, yaitu hal yang berhubungan dengan kesinambungan kesuksesan Negara yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban, yang akan mempengaruhi ketenangan organisasi untuk berkarya secara maksimal.
- 2) Faktor ekonomis, yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat sebagai daya beli untuk meningkatkan sektor lain sebagai sistem ekonomi yang lebih besar.
- 3) Faktor sosial, yaitu orientasi nilai yang berkembang ditengah masyarakat, yang mempengaruhi pandangan-pandangan mereka terhadap etos kerja yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi.
- 4) Tujuan Organisasi, yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diproduksi oleh organisasi.
- 5) Struktur organisasi, hasil dari desain antara fungsi yang akan dijalankan oleh unit organisasi dengan struktur formal yang ada.
- 6) Sumber Daya Manusia, yaitu kualitas dan pengelolaan anggota organisasi sebagai penggerak jalannya organisasi secara keseluruhan.
- 7) Budaya organisasi, yaitu gaya dan identitas suatu organisasi yang bersangkutan.

### **INDIKATOR PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI PUBLIK**

Terdapat beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu (Agus: 2012:45) :

- 1) Aspek Produktivitas, yaitu konsep yang tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara *input* dan *output*. Konsep produktivitas yang dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting Office* mencoba untuk mengembangkan satu ukuran dari produktivitas yang lebih luas dengan memasukan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.
- 2) Aspek Kualitas Pelayanan, isu mengenai kualitas pelayanan semakin penting dalam menjalankan kinerja organisasi pelayanan publik. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas pelayanan sering dapat diperoleh dari media massa ataupun diskusi publik. Akibat akses terhadap informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja organisasi publik yang mudah dan murah untuk digunakan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.
- 3) Aspek Responsivitas, adalah kemampuan organisasi publik untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas menunjukkan keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan

aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang buruk.

- 4) Aspek responsibilitas, menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.
- 5) Aspek akuntabilitas, yaitu akuntabilitas publik menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah. kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

#### **IV. METODE PENELITIAN**

##### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Hadari (2005) penelitian Deskriptif Kualitatif, artinya suatu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan suatu peristiwa untuk diambil kesimpulan secara umum. Oleh karena itu memfokuskan pada penggambaran dan pemecahan yang dianalisa secara deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah dengan memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang sesuai dengan situasi substansial yang dihadapi, untuk itu perlu data yang akurat dan harus dikumpulkan dianalisa secara sistematis demi ketetapan dalam pengkajiannya.

##### **b. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah.

##### **c. Unit Analisa Data**

Unit analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Dinas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan.

#### **d. Jenis Data**

##### 1) Data Primer

Dalam penelitian ini data primer yaitu data yang diperoleh langsung pada saat wawancara dengan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Barito Utara.

##### 2) Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder yang di dapatkan yaitu dokumen RPJMD Kabupaten Barito Utara 2013-2018, Lakip 2013-2015, dan data/dokumen lainnya terkait produktivitas sektor pertanian khususnya tanaman pangan di Kabupaten Barito Utara tahun 2015.

#### **e. Teknik Pengumpulan Data**

##### 1) Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam terkait peningkatan produktivas tanaman pangan dengan narasumber yaitu Sekretaris Dinas, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian, dan Petani.

##### 2) Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait produktivitas tanaman pangan yaitu Lakip, RPJMD, RKP, RKA dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan.

##### 3) Observasi

Dalam penelitian ini observasi langsung yang dilakukan di Kabupaten Barito Utara dalam meningkatkan produktivitas tanaman pangan.

#### **f. Teknik Analisis Data**

Teknik yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana data dan bahan yang akan digunakan adalah data yang diperoleh dari lapangan dan kemudian di dukung dengan data-data lain seperti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian. Langkah-langkah dalam penggunaan data hingga pengambilan keputusan yaitu :

- 1) Mengumpulkan informasi atau data yang berkaitan dengan masalah yang diperoleh di lapangan yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga diperoleh hasil akhir yang akurat dari data tersebut.
- 2) Memeriksa data yang diperoleh di lapangan, yaitu mengadakan pemeriksaan data yang diperoleh di lapangan yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga dapat diperoleh hasil akhir yang akurat dari data tersebut.
- 3) Menyusun klarifikasi informasi dari data yang diperoleh, dimana input ini diperoleh melalui beberapa tahap yaitu pengumpulan informasi, pemroses data,

dan dari setiap tahapan tersebut dapat mempengaruhi akurasi dan kualitas kesimpulan yang akan didapatkan nantinya.

- 4) Mendeskripsikan dan menganalisis sekaligus menginterpretasikan data. Analisis data didasarkan pada jenis informasi dan kategori laporan penelitian dimana jenis informasinya bisa berupa deskriptif.
- 5) Mengambil kesimpulan, yaitu merupakan tahap paling akhir yang memberi informasi tentang apa yang telah dilakukan oleh peneliti secara singkat dan padat dari keseluruhan data dan laporan yang telah diperoleh dari penelitian.

## V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Barito Utara merupakan salah satu kabupaten yang dimana perekonomian masyarakatnya masih bergantung kepada sektor pertanian. Hal ini yang membuat sektor pertanian di Kabupaten Barito Utara harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam menangani sektor pertanian ini, tentu diharuskan untuk memberikan kinerja yang maksimal agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani yang berada di wilayahnya. Selain meningkatkan kesejahteraan petani, Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan juga harus dapat memberikan pelayanan yang baik dalam membantu masyarakat dalam mengatasi masalah yang terkait dengan sektor pertanian. Dinas Pertanian, Perikanan, dan peternakan juga harus dapat memberikan visi dan misi yang jelas untuk membuat program dan kegiatan yang tujuannya membantu masyarakat petani.

Untuk mengetahui sejauh mana kinerja dari Dinas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan ini, maka perlu adanya evaluasi terhadap pekerjaan yang telah mereka lakukan. Dalam melakukan evaluasi terhadap kinerjanya maka digunakan indikator penilaian dalam mengukur keberhasilan dari kinerjanya. Indikator pengukuran yang dijadikan acuan dalam evaluasi kinerja ini adalah sebagai berikut :

### a. Aspek Produktivitas

Produktivitas yang ingin dicari dalam penelitian ini adalah program yang dibuat oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan. Program Masing-masing bidang dalam Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan tentu bervariasi yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan pelayanannya. Bidang-bidang yang berada dalam struktur Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan terdapat empat bidang dan satu sekretariat. Bidang tersebut yaitu Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Perikanan, Bidang Peternakan, dan Bidang pengendalian Hama dan Penyakit. Dalam penelitian ini yang akan membahas kinerja dari Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan dalam meningkatkan hasil produksi tanaman pangan dapat dilihat dari program-program dari Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. Program dari Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura di Dinas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut:



## 1) Peningkatan Kesejahteraan Petani

Kegiatan program kesejahteraan petani ini dilakukan dua kali dalam setahun, sebelum menanam dan kedua setelah panen. Dalam melakukan pelatihan dan pendampingan ini Dinas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan membagi anggotanya menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama melakukan pelatihan dan pendampingan pada kelompok tani di kecamatan gunung purei, gunung timang, dan montallat. Kelompok kedua melakukan pelatihan dan pendampingan di kecamatan teweh timur dan teweh tengah, kelompok ketiga melakukan pelatihan dan pendampingan kepada kelompok tani teweh selatan dan teweh baru. Dan kelompok keempat melakukan pelatihan dan pendampingan pada kelompok tani di kecamatan lahei dan lahei baru. Pelatihan ini juga melatih para petani untuk bisa mengolah hasil produksi menjadi produk berupa kripik dan lain-lain. Pelatihan management juga diberikan kepada kelompok tani untuk mengelola kelompok pertaniannya. Dalam pelatihan ini materinya menekankan kepada cara petani mengolah tanah, cara persemaian benih, strategi irigasi yang baik, cara pemupukan yang efektif serta cara penanggulangan hama.

## 2) Peningkatan Ketahanan Pangan

Program ketahanan pangan ini mempunyai tujuan untuk mewujudkan Ketahanan Pangan yang memenuhi dimensi waktu setiap saat pangan, tersedia dan dapat diakses serta berorientasi pada pemenuhan azas kesehatan. Untuk mencapai program ini Dinas Pertanian, perikanan dan peternakan melakukan dengan kegiatan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT). Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT) adalah program nasional untuk meningkatkan produksi melalui pendekatan gerakan atau anjuran secara massal kepada petani atau kelompok tani untuk melaksanakan teknologi pengelolaan tanaman terpadu dengan mengelola usaha tani. Dengan tujuan meningkatkan produktivitas, pendapatan petani, dan kelestarian lingkungan. Kegiatan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu ini sumber dana dari APBN dengan luas tanam seluas 1.990 Ha. Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Teweh Tengah, Teweh Selatan, Gunung Timang dan Kecamatan Montallat. Pelaksanaannya dilakukan langsung oleh petani wilayah setempat dengan bantuan paket berupa saprodi seperti benih padi, pupuk, obat-obatan dan bantuan tanam jajar legowo. Kegiatan ini berkontribusi di dalam peningkatan produksi dan produktivitas padi di Kabupaten Barito Utara. Untuk mendukung kegiatan ini Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan telah memberikan bantuan berupa Pupuk NPK 25.000 Kg kepada dua kecamatan yaitu kecamatan Teweh Selatan (desa Trahean, desa Trinsing, desa Transbangdep) dan Kecamatan Gunung Timang (desa baliti dan desa walur). Bantuan pemberian kapur ekstra pertanian 3.000 kg di kecamatan Teweh Selatan (desa trahean, trinsing, dan transbangdep). Bantuan pemberian petisida organik 2.000 Liter kepada Kecamatan Teweh Tengah, Teweh Baru, Teweh Timur, Gunung Purei, Montallat dan Kecamatan Gunung Timang. Bantuan pemberian PPC Bio Hoos 6.800 Liter

kepada Kecamatan Teweh Tengah, Teweh Baru, Teweh Timur, Gunung Purei, Montallat dan Gunung Timang. Pengembangan Jagung hibrida dari kegiatan GPPTT dan dana dari APBN seluas 100 Ha, dengan lokasi kegiatan di Desa Mampuak I Kecamatan Teweh Timur, sedangkan dari kegiatan APBN-P seluas 500 Ha. berada di Desa Mampuak I, II, Jamut dan Desa Liju. Sumber dari kegiatan APBD I seluas 100 Ha. berlokasi di Desa mampuak II dan Desa Liju. Dari hasil Jagung Hibrida, produktivitas 36,09 Kw/Ha dengan produksi 1.451 Ton. Kegiatan Penangkar kedelai dari kegiatan APBN Tahun 2015 di Kabupaten Barito Utara dilaksanakan di Desa Rimba sari Kecamatan Teweh Tengah dengan luas tanam 25 Ha. Untuk kegiatan GPPTT kedelai dari dengan luas tanam 250 Ha. yang berlokasi di Desa Batu Raya I dan Desa Batu Raya II Kecamatan Gunung Timang, dari hasil produksi terhitung Produktivitas 13,36 Kw/Ha.

### 3) Pemasaran hasil produksi pertanian

Program ini bertujuan untuk memasarkan atau membantu para petani untuk menjual hasil produksi pertaniannya. Kegiatan yang dilakukan dalam hal ini yaitu promosi atas hasil produksi pertanian para petani. Dengan kegiatan promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah, petani dan kelompok tani dapat turut serta mempromosikan produk-produk unggulannya. Kegiatan ini tentu akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi lokal di kawasan pengembangan sektor pertanian. Maksud dan tujuan pameran atau promosi produk unggulan kepada konsumen pada segmen yang akan dituju dan tidak hanya sekedar menunjukkan eksistensi produk. Tujuan dari kegiatan ini yaitu memperluas pemasaran produk pertanian dan produk olahan sampai tingkat nasional dan meningkatkan omset produk yang dihasilkan atau dipasarkan. Adapun promosi yang sudah dilakukan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan yaitu mengadakan Pameran yang di adakan di kota Muara Teweh sebagai Ibu Kota Kabupaten Barito Utara. kemudian Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan juga beberapa kali ikut pameran lokal skala nasional.

Dari adanya kegiatan yang mempromosikan hasil produksi tanaman pangan ini dapat meningkatkan kreativitas para petani untuk menghasilkan produk-produk unggulannya. Dalam tahun 2015 sudah ada tujuh produk unggulan yang di promosikan yaitu: Keripik Singkong, Keripik Ubi Ungu, Keripik Sukun, Keripik Talas, Tape Singkong/Ketan, Brownis Ubi Ungu, dan Kopi Kedelai.

#### b. Aspek Kualitas Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan memberikan dua cara pelayanan kepada masyarakat petani. Pelayanan yang diberikan yaitu pelayanan fisik dan pelayanan non-fisik. Pelayanan fisik yang dilakukan adalah dengan memberikan fasilitas kepada petani untuk membantu petani bekerja di lapangan. Alat dan Mesin pertanian yang sudah diberikan oleh Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan dalam tahun 2015 yaitu : hand traktor sebanyak

26 unit, mesin panen dan mesin tanam padi sebanyak 11 unit, pompa air sebanyak 46 unit, Terpal jamur sebanyak 640 lembar, cangkul sebanyak 50 buah, power thresher 36 unit, jet pump 6 unit, dan Mesin Pemotong rumput 10 buah. Pemberian fasilitas ini diharapkan mampu membantu petani bekerja lebih cepat.

pelayanan non-fisik yaitu pelayanan dengan memberikan penyuluhan kepada para petani. Pelayanan ini berupaya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat petani. Dengan melakukan pertemuan rutin atau dua bulan sekali antara penyuluh dengan Gapoktan. Pertemuan itu akan membahas permasalahan yang dihadapi oleh petani dan petani bisa menyampaikan keluhan-keluhannya lewat pertemuan itu.

c. Aspek Responsivitas

Dalam melayani masyarakat petani hal yang paling utama diberikan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Utara berupa pertukaran informasi antara Dinas dengan masyarakat petani terkait kegiatan yang berguna untuk peningkatan produksi pertanian. Contohnya seperti membantu petani mengatasi permasalahan hama yang menyerang lahan pertaniannya. Dan jika terdapat kegiatan dari tingkat Kabupaten, Provinsi, ataupun Nasional maka pihak Dinas akan langsung memberikan informasi kepada petani. Informasi terkait program atau kegiatan pertanian akan disampaikan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Barito Utara kepada pengelola atau ketua GAPOKTAN ( Gabungan Kelompok Tani) atau perwakilannya yang nanti informasi akan disampaikan kepada masyarakat dalam pertemuan rutin.

d. Aspek Responsibilitas

Dinas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Barito Utara dalam menangani masalah pertanian tentunya sudah menjadi suatu kewajiban yang mana dalam pembuatan program yang berkaitan dengan peningkatan hasil produksi tanaman pangan. Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan sudah menjalankan visi dan misi tersebut dilihat berdasarkan renstra tahun 2013-2018 diatas memperkuat penjelasan bahwa arah kebijakan dalam pembuatan program sudah disesuaikan dengan visi dan misi dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Utara.

Visi dan misi tersebut menjadikannya penanganan yang baik terhadap peningkatan hasil produksi tanaman pangan maka Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan menyediakan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini di sediakan untuk para petani. Berupa alat-alat buat bertani dan pembuatan embung, pembuatan *Rice Milling Unit*, Pembuatan *pondok meeting*, pembuatan turab BPP, pembuatan Plang nama BPP di beberapa kecamatan, dan pemberian alat-alat untuk membantu pekerjaan petani.

e. Aspek Akuntabilitas

Didalam Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Utara komunikasi antar pegawai berjalan dengan baik dan kedisiplinan yang tinggi tidak akan lepas dari komunikasi yang baik. Dengan adanya keterkaitan tersebut, dengan adanya suatu masalah dengan birokrasi atau masyarakat bisa diselesaikan dengan baik sesuai dengan aturan. Tanpa terkecuali dalam menangani masalah pertanian. Jika sudah terjalin komunikasi yang baik antara kedua belah pihak maka akan mempermudah proses pelaksanaan kegiatan dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Utara menjadi lebih berkembang dan memiliki kualitas yang baik.

Kendala-kendala yang ditemukan di lapangan Dalam mengembangkan komoditas unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Barito Utara. Berdasarkan hasil analisa wawancara dan data yang diperoleh di lapangan. Terdapat beberapa kendala yang dimiliki oleh Dinas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan, yaitu: Masih tingginya tingkat serangan OPT terhadap tanaman pangan menjadikan kendala dalam meningkatkan produktivitasnya. Serangan OPT dan Hama kepada tanaman pangan ini tentunya akan sangat berdampak kepada hasil yang akan didapatkan. Bahkan para petani bisa saja gagal panen dikarenakan tanaman pangan yang ditanam sudah habis diserang oleh OPT dan Hama. Selain itu juga serangan OPT ini tidak hanya merugikan pemerintah akan tetapi juga sangat merugikan para Petani selaku pemilik tanah. Kedua, kendala petani yang menyebabkan ketiadaan modal adalah disebabkan oleh sulitnya mengakses lembaga keuangan formal, disebabkan tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit yang harus menggunakan agunan. Oleh sebab persoalan diatas, maka para petani, lebih memilih “rentenir” yang menyediakan pinjaman modal dengan cepat meski dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dibanding lembaga keuangan formal. Kondisi ini, pada akhirnya semakin memperburuk arus tunai dan kesejahteraan petani. Ketiga, Jumlah alat dan mesin yang tersedia ini juga telah terjadi penurunan dari tahun sebelumnya karena banyaknya alat dan mesin yang rusak sehingga tidak bisa digunakan. Masih belum tersedianya secara merata ketersediaan alat dan mesin pertanian per kecamatan. Ada beberapa kecamatan yang masih belum disediakan alat dan mesin pertanian seperti salah satunya Kecamatan Lahei Barat. Lahei Barat yang hanya baru tersedia RMU sebanyak 10 buah.

## **VI. KESIMPULAN**

Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian yakni bagaimana Kinerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan dalam meningkatkan hasil produksi komoditas unggulan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2015. Yang dianalisa dengan konsep teoritis Agus Dwiyanto yang mengukur kinerja dari aspek produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Barito Utara dalam mengembangkan komoditas unggulan khususnya tanaman pangan dalam tahun 2015 sudah baik. Dilihat dari produksi sektor pertanian tanaman pangan yang mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2013 hingga tahun 2015.

Aspek kualitas pelayanan dan responsivitas belum maksimal dikarenakan belum tersedia secara merata pelayanan komunikasi yang memanfaatkan teknologi komunikasi sehingga perbaikan pelayanan yang bersumber dari masyarakat tidak dapat direspon dengan cepat. Kurangnya responsivitas yang disebabkan oleh Sistem Informasi yang birokratis menyebabkan masukan-masukan yang ada hanya bisa diserap melalui pertemuan-pertemuan secara langsung.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Barito Utara dalam meningkatkan produktivitas tanaman pangan yaitu Masih tingginya tingkat serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), keterbatasan petani terhadap akses permodalan, dan masih kurangnya alat dan mesin pertanian yang dimiliki. Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Kinerja Dinas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan dalam meningkatkan produktivitas tanaman pangan tahun 2015 sudah sangat baik, sehingga diharapkan adanya peningkatan untuk tahun-tahun berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Dari Buku

- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Dwiyanto, Agus. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Harris, Syamsuddin. 2005. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah (desentralisasi, demokratisasi dan akuntabilitas pemerintahan daerah)*. Jakarta: LIPI Press
- Jefkins, Frank. 1992. *Public Relations*. Jakarta: PT Rajawali Press
- Kaswan. 2012. *COACING DAN MONITORING untuk pengembangan SDM dan peningkatan kinerja Organisasi*. Bandung: Alfabeta
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah (reformasi, perencanaan, Strategi, dan Peluang)*. Jakarta: Erlangga
- Mangkunegara, Prabu Anwar, A.A. 2012. *Evaluasi Kinerja SDM*, Bandung : PT. Refika Aditama
- Manullang, Marihot. 2010. *Manajemen Personal*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Napitupulu, Paiman. 2012. *menakar urgensi otonomi daerah*. Bandung: PT. Alumni
- Nawawi, Hadari. 2005. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan otonomi daerah*. Jakarta: PT Gramedia Widhiarsana
- Singarimbun, Masri. 1992. *Metode penelitian survey*. Jakarta: LP3S
- Singarimbun, Masri. & Efendy, Sofian. 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES
- Sudarmanto. 2014. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi dalam Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sudaryanto, Tahlim. dkk. 1997. *Industrialisasi, rekayasa sosial dan peranan pemerintah dalam pembangunan pertanian*, Jakarta: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Supriyanto, John. 2001. *Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karyawan*, Yogyakarta: BPFE

Surakhmad, Winarno. 1987. *Dasar-Dasar Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung: Tarsito

Suryabrata, Sumadi. 1983. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Syafiee, Inu Kencana. 2000. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta : PT. Pertja

Tangkilisan, Hessel Nogi, S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo

Widjaja,H.A.W. 2014. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Rajawali Pers

### **Sumber Dari Internet**

Badan Pusat Statistik, Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Utara 2009-2013, Diakses dari <https://barutkab.bps.go.id/index.php/publikasi/24>,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, *RPJMD Kabupaten Barito Utara 2013-2018*, <http://bappedabarut.com/2015/01/dokumen-rpjmd-kabupaten-barito-utara-tahun-2013-2018/>,

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara

### **Dokumen-dokumen**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Utara Tahun 2013

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Utara Tahun 2014

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Utara Tahun 2015

Rencana Strategis Dinas Pertanian,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018